

Implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah Pertahanan Laut Guna Meningkatkan Komponen Pertahanan di Wilayah Surabaya

Loi Putra.H^{1*}, Totok Susilo², Mostein A. Puji³
¹⁻³Akademi Angkatan Laut, Indonesia

Alamat: Jl. Bumimoro Morokrembangan, Surabaya, Jawa Timur, 60178, Indonesia
Korespondensi Penulis : loiputraalin@gmail.com*

Abstract. *The implementation of the Regional Spatial Plan (RTRW) for marine defense in the Surabaya area aims to analyze the impact of infrastructure development management and defense components on improving marine defense components. The Indonesian Navy V Surabaya Main Base (Lantamal V Surabaya) was chosen because it has a strategic base area and has the most complete facilities for implementing marine defense activities in Indonesia. The methodology used in this study includes a descriptive method with a qualitative approach. Supporting data was collected through interviews, field observations, and documentation studies. Data analysis was carried out using interactive analysis techniques including data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions to analyze coordination between government agencies and the military and the impact of infrastructure development on operational readiness of marine defense. The results of the study indicate that the implementation of the Marine Defense RTRW in Lantamal V Surabaya has been running well and in accordance with applicable regulations with supporting factors, including government policies, budget support, and coordination between related institutions. Effective planning and management of the Marine Defense RTRW is important to support the readiness and capability of marine defense. This study provides recommendations for improving coordination between institutions, optimizing land use, and increasing the budget for the development of marine defense infrastructure through online (zoom meeting or google meet) can improve the Cadet Exchange program.*

Keywords: *Implementation of RTRW, Sea defense, Government policy, Operational readiness,*

Abstrak. Implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) pertahanan laut di wilayah Surabaya bertujuan untuk menganalisis dampak pengelolaan pembangunan infrastruktur serta komponen pertahanan terhadap peningkatan komponen pertahanan laut. Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut V Surabaya (Lantamal V Surabaya) dipilih karena memiliki wilayah pangkalan yang strategis dan memiliki fasilitas terlengkap untuk pelaksanaan kegiatan pertahanan laut di Indonesia. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini mencakup metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data pendukung dikumpulkan melalui wawancara, observasi lapangan, serta studi dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis interaktif yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk menganalisis koordinasi antara instansi pemerintah dan militer serta dampak pembangunan infrastruktur terhadap kesiapan operasional pertahanan laut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi RTRW Pertahanan Laut di Lantamal V Surabaya telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan faktor pendukung, meliputi kebijakan pemerintah, dukungan anggaran, serta koordinasi antar lembaga terkait. Adapun perencanaan dan pengelolaan RTRW Pertahanan Laut yang efektif penting untuk mendukung kesiapan dan kemampuan pertahanan laut. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk melakukan peningkatan koordinasi antar lembaga, optimalisasi penggunaan lahan, serta peningkatan anggaran untuk pengembangan infrastruktur pertahanan laut.

Kata kunci : Implementasi RTRW, Pertahanan laut, Kebijakan pemerintah, Kesiapan operasional

1. PENDAHULUAN

Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut V Surabaya atau (Lantamal V Surabaya) adalah salah satu dari beberapa pangkalan militer TNI Angkatan Laut di Indonesia yang bermarkas di Surabaya, Jawa Timur. Dari 14 Pangkalan TNI AL Lantamal V adalah yang terbesar di Indonesia dan mempunyai fasilitas pangkalan yang terlengkap, hampir separuh kekuatan TNI Angkatan Laut Indonesia berada di Surabaya, hal ini menunjukkan betapa pentingnya

Pangkalan Utama TNI AL V Surabaya. Melihat dari sejarahnya bahwa pangkalan tersebut di bangun sejak zaman penjajahan Belanda pada tahun 1878. Wilayah kerja Lantamal V Surabaya meliputi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur dan Bali. Saat ini Lantamal V membawahi delapan Lanal, meliputi Lanal Cilacap, Lanal Tegal, Lanal Semarang, Lanal Yogyakarta, Lanal Malang, Lanal Batuporon, Lanal Banyuwangi dan Lanal Denpasar.

Lantamal V Surabaya mempunyai KRI pada Satuan Kapal Patroli yang terdiri dari KRI Salawaku - 842, KAL Katon II- 5-34, KAL Warakas II-5-35, Patkamla P. Pagerungan II-5-37, SBF 8/ TG. Awar Awar II-5-03, SBF 8/ TG. Modung II-5-04, Sea Rider, RHIB Trimaran 12 M, RHIB 8M, SBF (SOPS Lantamal V Surabaya,2024). Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) pertahanan laut adalah jabaran secara rinci dari perencanaan Wilayah Pertahanan yang mengindikasikan lokasi Wilayah Pertahanan statis dan dinamis matra laut. Tata kelola yang kurang optimal berpotensi menyebabkan kecelakaan kapal berupa kapal tenggelam, kapal terbakar, kapal tubrukan dan kapal kandas, yang tentu berpengaruh pada lalu lintas KRI dalam melaksanakan tugas operasi. Beberapa contoh kasus kecelakaan kapal di APBS yang melibatkan KRI diantaranya KRI Pulau Ratewo 702 yang tenggelam karena bertabrakan dengan MV Iris di bouy 11 perairan Gresik pada Mei 2000. Pada saat itu KRI Pulau Ratewo hendak keluar dari Tanjung Perak, sedangkan MV Iris hendak masuk.

Fokus penelitian ini pada implementasi rencana tata ruang wilayah pertahanan laut bertujuan untuk memahami dan meningkatkan koordinasi serta tata kelola yang optimal dalam menjaga keamanan laut, mempertimbangkan peran krusial Lantamal V. Dengan pemahaman mendalam terhadap kompleksitas ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap perbaikan sistem pertahanan laut wilayah Surabaya yang melibatkan Lantamal V.

2. METODE

Pendekatan penelitian adalah suatu kerangka metodologis yang memberikan arah pada proses pengumpulan dan analisis data. Dalam konteks penelitian ini, digunakan pendekatan kualitatif yang menitikberatkan pada pemahaman mendalam tentang implementasi rencana tata ruang wilayah pertahanan laut di Lantamal V Surabaya. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk merinci kompleksitas dan konteks dari fenomena tersebut. Metode ini memungkinkan pengumpulan data yang bersifat deskriptif, memungkinkan pemahaman holistik terhadap bagaimana implementasi dilakukan dan bagaimana aktor-aktor terlibat mengartikan dan meresponsnya (Denzin & Lincoln, 2018). Pendekatan kualitatif memberikan kebebasan dalam mengeksplorasi makna-makna yang muncul dari fenomena di lapangan. Oleh karena itu,

pendekatan kualitatif ini dianggap paling sesuai untuk mendapatkan wawasan mendalam dan kontekstual terkait dengan implementasi rencana tata ruang wilayah pertahanan laut di Lantamal V Surabaya.

Penelitian ini mengandalkan dua kategori utama dalam pengumpulan data, yakni sumber primer dan sumber sekunder.

a. Sumber Primer:

1. Wawancara Mendalam. Informasi diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Asops Danlantamal V Surabaya dan Asrena Danlantamal V Surabaya. Tujuan wawancara adalah untuk mendapatkan wawasan langsung dan mendalam mengenai implementasi rencana tata ruang wilayah pertahanan laut.
2. Observasi Partisipatif: Data juga dikumpulkan melalui observasi partisipatif, di mana peneliti terlibat langsung dalam kegiatan terkait implementasi rencana tata ruang. Observasi ini memberikan kesempatan untuk pengamatan langsung terhadap praktik-praktik dan dinamika yang mungkin tidak terungkap melalui wawancara.

b. Sumber Sekunder

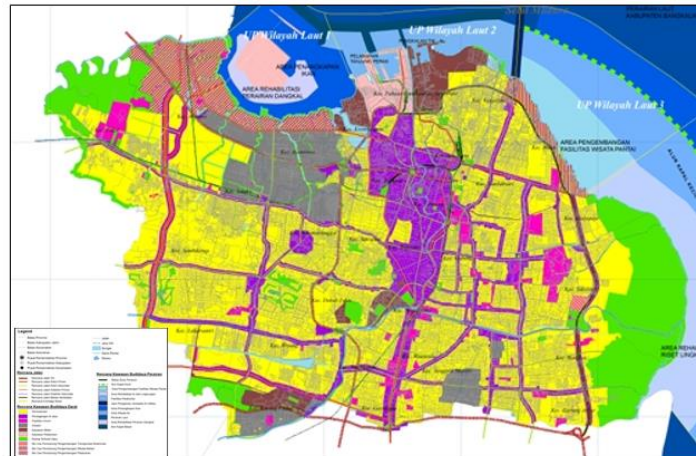
1. Dokumen Resmi: Informasi sekunder diperoleh dari dokumen resmi seperti kebijakan, pedoman implementasi, dan dokumen terkait lainnya yang dikeluarkan oleh Lantamal V. Dokumen-dokumen ini memberikan konteks dan rincian terkait dengan strategi, prosedur, dan kebijakan yang terlibat dalam implementasi.
2. Laporan Kecelakaan Kapal: Dokumen laporan kecelakaan kapal, baik yang melibatkan kapal militer maupun sipil, juga akan menjadi sumber data untuk mengevaluasi dampak implementasi rencana tata ruang wilayah pertahanan laut terhadap keamanan pelayaran

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyajian Data.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) untuk wilayah pertahanan laut Surabaya merupakan komponen vital dalam mengintegrasikan kebutuhan pertahanan dan keamanan nasional dengan pembangunan daerah. Sebagai salah satu pangkalan militer terbesar di Indonesia, Lantamal V Surabaya memiliki peran strategis dalam menjaga kedaulatan dan keamanan wilayah perairan. RTRW ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap aspek penggunaan lahan dan perairan di sekitar pangkalan militer mendukung operasional dan kesiapan tempur Angkatan Laut. Dengan memperhatikan zonasi, infrastruktur pertahanan, dan jalur logistik, RTRW wilayah pertahanan laut Surabaya tidak hanya menjamin efektivitas

operasional militer tetapi juga melindungi dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya laut secara berkelanjutan. Koordinasi yang erat antara pemerintah daerah dan Lantamal V Surabaya menjadi kunci dalam mewujudkan tata ruang yang aman, efisien, dan mendukung pertumbuhan serta stabilitas regional. Peta rencana pola ruang kota Surabaya terlihat pada gambar 1 dibawah ini.



Gambar 1. Peta Rencana Pola Ruang Kota Surabaya

Sumber: Perda Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014

Berdasarkan gambar 4.1 peta rencana pola ruang kota Surabaya terlihat pada area berwarna coklat sebagai area Kawasan Militer yang dimana terdapat wilayah Lantamal V dan Koarmada II yang merupakan wilayah yang di gunakan sebagai tempat pertahanan laut dan merupakan pusat operasional dari komponen-komponen pertahanan yang berada di bawah jajaran Koarmada II. Berdasarkan hasil wawancara kepada beberapa narasumber yang memiliki kualifikasi dalam bidang tersebut, penulis menghubungkan data dan jawaban yang telah diberikan dengan keempat variabel teori Geoge Edward III. Dari banyaknya data dan fakta yang telah dialami langsung oleh narasumber di lapangan, penulis telah mengerucutkan analisa melalui proses reduksi data melalui jawaban wawancara tertulis. Penulis juga kembali melaksanakan verifikasi jawaban kepada Asops dan Asrena Lantamal V Surabaya melalui proses wawancara mendapatkan hasil:

a. Komunikasi

- 1) Proses Penyampaian Kebijakan dari Pemerintah Daerah ke Lantamal V Surabaya. Penyampaian kebijakan atau peraturan terkait Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dari pemerintah daerah ke Angkatan Laut melibatkan koordinasi dan komunikasi antara pihak terkait. Gambaran umum tentang proses tersebut melalui beberapa langkah yaitu:
 - a) Penyusunan RTRW.
 - b) Koordinasi Internal.

- c) Konsultasi.
 - d) Pengesahan RTRW.
 - e) Koordinasi dengan Angkatan Laut.
 - f) Implementasi Bersama.
- 2) Kendala yang Terjadi Saat Penyampaian Kebijakan dari Pemerintah Daerah ke Lantamal V Surabaya. Beberapa kendala yang mungkin muncul dalam penyampaian informasi kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dari pemerintah daerah ke Lantamal V Surabaya dapat melibatkan berbagai aspek. Beberapa potensi kendala termasuk :
- a) Ketidaksesuaian Kepentingan.
 - b) Kurangnya Koordinasi.
 - c) Keterbatasan Sumber Daya.
 - d) Perbedaan Pandangan dan Prioritas.
 - e) Ketidakpahaman tentang Implikasi.

b. Sumber Daya

- 1) Kualitas Sumber Daya Manusia pada Lantamal V Surabaya. Pendidikan dan edukasi tentang RTRW ini umumnya termasuk dalam bagian dari pelatihan dan briefing berkala yang diberikan kepada personel militer dan sipil di Lantamal V Surabaya. Beberapa aspek yang mungkin dicakup dalam edukasi terkait RTRW Surabaya dapat mencakup :
- a) Pengetahuan Umum tentang RTRW.
 - b) Implikasi terhadap Kegiatan Pertahanan Laut.
 - c) Koordinasi dan Komunikasi dengan Pemerintah.
 - d) Peran dalam Pengambilan Keputusan.
 - e) Update Berkala.
- 2) Kerusakan pada Fasilitas Pertahanan di Wilayah Lantamal V Surabaya.
- Pada umumnya, jika fasilitas militer atau pertahanan di suatu daerah pertahanan Lantamal V Surabaya mengalami kerusakan, pihak militer akan terlibat dalam proses perbaikan dan pemulihan fasilitas tersebut. Fasilitas militer memiliki peran khusus dan keamanan tertentu yang mungkin tidak dapat digantikan oleh fasilitas pemerintah daerah. Oleh karena itu, dalam banyak kasus, upaya pemulihan dan perbaikan fasilitas militer akan dilakukan oleh atau atas kerjasama dengan pihak militer yang bersangkutan. Namun, dalam beberapa situasi, terutama jika kerusakan bersifat sangat parah dan pemulihan membutuhkan waktu yang lama, pihak militer dapat mengkoordinasikan upaya dengan

pemerintah daerah atau instansi lain. Kerjasama seperti ini dapat mencakup penggunaan fasilitas atau sumber daya pemerintah daerah untuk sementara waktu selama proses pemulihan.

Prosedur dan kebijakan terkait pemulihan fasilitas dapat bervariasi tergantung pada karakteristik kerusakan, urgensi pemulihan, serta kesepakatan dan koordinasi antara pihak militer dan pemerintah daerah. Penting untuk memahami bahwa keamanan nasional dan operasional militer adalah prioritas utama, dan keputusan terkait pemulihan fasilitas akan diambil dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut. Tetapi hingga saat ini, dalam wilayah Lantamal V Surabaya khususnya daerah perairan Surabaya sendiri, fasilitas instansi militer belum ada yang mengalami kerusakan parah yang mengharuskan pihak militer menggunakan fasilitas pemerintah daerah atau instansi lainnya.

c. Disposisi

1) Perilaku yang Ditunjukkan oleh Subjek Pelaksana Kebijakan

Perilaku yang ditunjukkan oleh subjek pelaksana kebijakan di Lantamal V Surabaya umumnya mencerminkan profesionalisme, dedikasi, dan ketaatan terhadap tugas dan tanggung jawab mereka dalam menjalankan operasional militer serta mendukung kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh TNI Angkatan Laut dan pemerintah. Beberapa perilaku kunci yang dapat diharapkan dari subjek pelaksana kebijakan di Lantamal V Surabaya termasuk :

- a) Ketaatan pada Peraturan dan Hukum.
- b) Profesionalisme.
- c) Kesetiaan dan Kepatuhan.
- d) Keahlian dan Pelatihan.
- e) Koordinasi dan Kolaborasi.
- f) Tanggung Jawab terhadap Fasilitas dan Peralatan.
- g) Komitmen terhadap Tugas.

2) Kecenderungan Penyalahgunaan Kebijakan dan Keuntungan Pribadi.

Adanya kecenderungan penyalahgunaan dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk ketidaktransparan, kurangnya akuntabilitas, atau adanya peluang untuk memanfaatkan kebijakan untuk keuntungan pribadi. Beberapa potensi masalah yang dapat muncul melibatkan:

- a) Korupsi.
- b) Nepotisme dan Kolusi.
- c) Ketidaktransparan.
- d) Ketidaksetaraan dan Diskriminasi.

d. Birokrasi

Untuk menangani masalah implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Lantamal V Surabaya mungkin memiliki struktur birokrasi yang terkoordinasi dan khusus. Berikut adalah bentuk struktur birokrasi yang ada di Lantamal V Surabaya:

1. Bagian Perencanaan dan Pengembangan Maritim bertanggung jawab atas perumusan strategi dan kebijakan terkait tata ruang wilayah maritim yang menjadi tanggung jawab Lantamal V Surabaya. Mereka dapat mengkoordinasikan implementasi RTRW dengan kepentingan pertahanan laut.
2. Bagian Intelijen Maritim memantau dan menganalisis informasi intelijen terkait dengan ancaman keamanan di wilayah maritim yang terkait dengan pelaksanaan RTRW. Mereka memberikan informasi penting kepada pimpinan Lantamal V Surabaya untuk pengambilan Keputusan.
3. Bagian Hukum dan HAM memberikan nasihat hukum terkait dengan implementasi RTRW, memastikan bahwa kebijakan dan Tindakan yang diambil sesuai dengan hukum yang berlaku, serta melindungi hak asasi manusia dalam konteks pertahanan laut.
4. Biro Hukum dan Peraturan memberikan nasihat hukum terkait dengan implementasi kebijakan RTRW, memastikan bahwa Tindakan yang diambil sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.
5. Biro Hubungan Masyarakat dan Komunikasi bertanggung jawab atas komunikasi dengan pemerintah daerah, Masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya terkait dengan kebijakan RTRW. Mereka memastikan bahwa informasi tentang RTRW disampaikan dengan jelas dan efektif.
6. Biro Evaluasi dan Pengawasan memantau pelaksanaan kebijakan RTRW dan mengevaluasi dampaknya terhadap keamanan dan operasional militer. Mereka memberikan rekomendasi untuk perbaikan atau penyesuaian kebijakan jika di perlukan
7. Seksi Administrasi dan Kesekretariatan bertanggung jawab atas pengelolaan administrasi dan dokumentasi terkait dengan implementasi RTRW, termasuk pengarsipan dokumen, penjadwalan pertemuan, dan koordinasi kegiatan internal

Analisis Data.

Berdasarkan hasil wawancara kepada dua narasumber seperti yang tercantum pada penyajian data kami mendapatkan hasil melalui perhitungan kuisisioner wawancara, berikut adalah kalkulasi perhitungan dari pengambilan hasil jawaban wawancara dan kuisisioner kepada dua narasumber.

Tabel 1. Hasil Perhitungan Kuisisioner Wawancara.

No	Narasumber	Sumber Daya	Komunikasi	Disposisi	Struktur Birokrasi
1	Asops Lantamal V Surabaya	8	7	8	8
2	Asrena Lantamal V Surabaya	7	8	8	8

Sumber: Diolah oleh peneliti (2024)

Dari tabel diatas dapat kita buktikan bahwa dari keempat variabel yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan sruktur birokrasi, sumber daya dan komunikasi mendapatkan nilai terkecil dan sama dibandingkan dengan variabel yang lain. Variabel sumber daya dan komunikasi dianggap sebagai masalah yang ditemukan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan dalam RTRW wilayah pertahanan.

Pembahasan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilaksanakan dengan didukung data primer, sekunder dan dihubungkan dengan teori-teori yang relevan maka didapatkan hasil sebagai berikut:

a. Hubungan RTRW wilayah pertahanan laut dengan Teori Kebijakan Publik.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) wilayah pertahanan laut, seperti yang diterapkan di Surabaya, berkaitan erat dengan teori kebijakan publik. Teori kebijakan publik menyediakan kerangka kerja untuk memahami bagaimana kebijakan dirumuskan, diimplementasikan, dan dievaluasi. Berikut adalah bagaimana RTRW wilayah pertahanan laut terkait dengan beberapa aspek penting dari teori kebijakan publik:

- 1) Formulasi Kebijakan. Dalam tahap ini, RTRW wilayah pertahanan laut dirancang berdasarkan analisis kebutuhan pertahanan dan keamanan nasional serta kebutuhan pembangunan daerah.
- 2) Implementasi Kebijakan. Implementasi RTRW wilayah pertahanan laut melibatkan berbagai aktor, termasuk pemerintah daerah, militer (Lantamal V Surabaya), dan masyarakat..

- 3) **Evaluasi Kebijakan.** Evaluasi RTRW wilayah pertahanan laut bertujuan untuk menilai efektivitas kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi ini penting untuk melakukan perbaikan berkelanjutan dan memastikan kebijakan tetap relevan dan adaptif terhadap perubahan kondisi.
- 4) **Partisipasi Publik dan Transparansi.** Dalam konteks RTRW wilayah pertahanan laut, keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, sektor swasta, dan organisasi non-pemerintah, dapat meningkatkan legitimasi dan akuntabilitas kebijakan. Transparansi dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan juga penting untuk membangun kepercayaan publik.
- 5) **Koordinasi Lintas Sektor.** RTRW wilayah pertahanan laut memerlukan koordinasi yang erat antara berbagai sektor, termasuk pertahanan, perencanaan tata ruang, lingkungan, dan pembangunan ekonomi.

b. Hubungan RTRW wilayah pertahanan laut dengan Teori Perencanaan Wilayah

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) wilayah pertahanan laut memiliki hubungan yang erat dengan Teori Perencanaan Wilayah, yang merupakan kerangka konseptual untuk mengarahkan dan mengelola penggunaan lahan serta pengembangan wilayah secara strategis dan berkelanjutan. Berikut adalah beberapa aspek bagaimana RTRW wilayah pertahanan laut terkait dengan Teori Perencanaan Wilayah:

- 1) **Pendekatan Sistemik.** RTRW wilayah pertahanan laut mengintegrasikan berbagai aspek ini untuk memastikan bahwa pembangunan wilayah mendukung fungsi pertahanan serta kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan.
- 2) **Analisis Spasial.** RTRW wilayah pertahanan laut menggunakan analisis spasial untuk menentukan zonasi dan alokasi ruang yang optimal bagi kegiatan militer dan pertahanan, serta untuk memastikan tidak adanya konflik penggunaan lahan dengan kegiatan sipil dan komersial.
- 3) **Keseimbangan Penggunaan Lahan.** RTRW wilayah pertahanan laut berusaha mencapai keseimbangan ini dengan mengalokasikan ruang yang memadai dan strategis bagi instalasi militer tanpa mengganggu perkembangan ekonomi dan kebutuhan masyarakat setempat.
- 4) **Partisipasi Publik dan Kolaborasi.** RTRW wilayah pertahanan laut memerlukan koordinasi antara pemerintah daerah, instansi militer, masyarakat, dan sektor swasta untuk memastikan bahwa rencana yang dibuat dapat diterima oleh semua pihak dan dapat diimplementasikan dengan dukungan yang luas.

- 5) Pengelolaan Sumber Daya dan Lingkungan. RTRW wilayah pertahanan laut harus memperhatikan dampak lingkungan dari aktivitas militer dan mencari cara untuk meminimalkan dampak negatif tersebut, sambil memanfaatkan sumber daya yang ada secara efisien dan berkelanjutan.
- 6) Adaptabilitas dan Fleksibilitas. RTRW wilayah pertahanan laut harus dapat beradaptasi dengan perubahan situasi geopolitik, teknologi militer, dan dinamika sosial-ekonomi untuk tetap relevan dan efektif.

c. Hubungan RTRW wilayah pertahanan laut dengan Teori Pertahanan dan Keamanan

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) wilayah pertahanan laut memiliki hubungan yang erat dengan Teori Pertahanan dan Keamanan, yang fokus pada strategi, kebijakan, dan tindakan untuk melindungi negara dari ancaman dan memastikan stabilitas nasional. Berikut adalah beberapa cara bagaimana RTRW wilayah pertahanan laut berkaitan dengan Teori Pertahanan dan Keamanan:

- 1) Strategi Pertahanan Terpadu. RTRW wilayah pertahanan laut merupakan bagian integral dari strategi pertahanan nasional yang terpadu.
- 2) Posisi Geostrategis. RTRW wilayah pertahanan laut mempertimbangkan lokasi-lokasi strategis yang penting untuk pengawasan, pengendalian wilayah perairan, dan proyeksi kekuatan militer. Penempatan pangkalan dan instalasi militer di lokasi strategis memastikan perlindungan optimal dan pengendalian efektif terhadap wilayah laut.
- 3) Penggunaan Teknologi dan Infrastruktur. RTRW wilayah pertahanan laut mengatur pembangunan infrastruktur militer, seperti pangkalan angkatan laut, radar, dan sistem komunikasi, yang dilengkapi dengan teknologi canggih untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional militer.
- 4) Pertahanan Berlapis (Layered Defense). RTRW wilayah pertahanan laut berkontribusi pada pertahanan berlapis dengan memastikan bahwa berbagai fasilitas dan instalasi pertahanan ditempatkan secara optimal untuk memberikan lapisan perlindungan yang berkesinambungan dari ancaman eksternal.
- 5) Keamanan Maritim. RTRW wilayah pertahanan laut mendukung keamanan maritim dengan mengalokasikan ruang untuk patroli dan operasi keamanan laut, serta memastikan akses yang mudah dan cepat ke perairan strategis untuk keperluan militer.
- 6) Kolaborasi dan Sinergi. RTRW wilayah pertahanan laut mendorong kerjasama antara angkatan laut, pemerintah daerah, dan instansi terkait lainnya untuk memastikan koordinasi yang efektif dalam merespons ancaman dan mengelola wilayah pertahanan.

- 7) Resiliensi dan Kesiapsiagaan. RTRW wilayah pertahanan laut dirancang untuk meningkatkan resiliensi dengan memastikan adanya fasilitas pendukung yang dapat beroperasi dalam kondisi darurat dan mampu menghadapi gangguan atau serangan.
- 8) Perlindungan Aset Vital. RTRW wilayah pertahanan laut memastikan bahwa aset-aset vital, seperti pangkalan militer, pelabuhan, dan jalur logistik, dilindungi dengan baik dan ditempatkan di lokasi yang aman dari potensi ancaman.

d. Hubungan RTRW wilayah pertahanan laut dengan Teori Kebijakan Pertahanan

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) wilayah pertahanan laut memiliki hubungan yang erat dengan Teori Kebijakan Pertahanan, yang menyediakan kerangka analitis untuk merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kebijakan yang terkait dengan keamanan nasional dan pertahanan negara. Berikut adalah beberapa cara bagaimana RTRW wilayah pertahanan laut berkaitan dengan Teori Kebijakan Pertahanan:

- 1) Formulasi Kebijakan Strategis. Teori Kebijakan Pertahanan menekankan pentingnya formulasi kebijakan yang strategis berdasarkan analisis ancaman dan kebutuhan pertahanan. RTRW wilayah pertahanan laut dirancang dengan mempertimbangkan ancaman potensial terhadap wilayah perairan Indonesia, serta kebutuhan strategis untuk menjaga kedaulatan dan keamanan maritim. Ini mencakup analisis spasial untuk menentukan lokasi strategis bagi pangkalan dan instalasi militer.
- 2) Integrasi Kebijakan Nasional. RTRW wilayah pertahanan laut harus selaras dengan kebijakan pertahanan nasional yang lebih luas. RTRW mendukung kebijakan nasional dengan memastikan bahwa semua aspek tata ruang wilayah laut mendukung tujuan pertahanan dan keamanan negara.
- 3) Penggunaan Sumber Daya. RTRW wilayah pertahanan laut mengatur alokasi sumber daya fisik (lahan dan infrastruktur) serta sumber daya manusia untuk mendukung operasi dan logistik militer. Dengan pengaturan yang tepat, sumber daya dapat digunakan secara optimal untuk memenuhi kebutuhan pertahanan.
- 4) Adaptabilitas dan Fleksibilitas. RTRW wilayah pertahanan laut harus dirancang agar dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi, perubahan geopolitik, dan ancaman baru yang mungkin muncul.
- 5) Keterlibatan Pemangku Kepentingan. RTRW wilayah pertahanan laut melibatkan koordinasi antara berbagai instansi pemerintah, militer, dan masyarakat. Keterlibatan ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat dapat diterima dan didukung oleh semua pihak yang terlibat.

- 6) Pengawasan dan Evaluasi. RTRW wilayah pertahanan laut harus memiliki mekanisme pengawasan dan evaluasi untuk memastikan bahwa implementasi kebijakan sesuai dengan rencana dan dapat diadaptasi jika diperlukan. Evaluasi rutin membantu mengidentifikasi kekurangan dan area untuk perbaikan.
- 7) Keamanan Nasional dan Stabilitas Regional. RTRW wilayah pertahanan laut mendukung upaya ini dengan memastikan bahwa tata ruang wilayah laut mendukung operasi pertahanan yang efektif dan menjaga stabilitas regional. Ini mencakup perlindungan aset strategis dan jalur logistik penting.
- 8) Pengembangan Kapabilitas Pertahanan. RTRW wilayah pertahanan laut dirancang untuk mendukung pembangunan fasilitas dan infrastruktur yang diperlukan untuk meningkatkan kapabilitas operasional militer, termasuk fasilitas pelatihan, logistik, dan perawatan.

4. KESIMPULAN

Implementasi rencana tata ruang wilayah pertahanan di wilayah Surabaya sudah terlaksana dengan baik. Hal ini terlihat pada :

- a. Tata kelola pembangunan infrastruktur pertahanan laut di wilayah Surabaya belum terkelola dengan baik di tandai dengan masih adanya kekurangan pada komunikasi dan sumber daya
- b. Hubungan antara instansi pemerintah dengan instansi militer terkait pembangunan infrastruktur di wilayah Surabaya sudah terjalin dengan baik tetapi masih memiliki kekurangan dimana antar instansi belum memprioritaskan masalah RTRW
- c. Dampak dari pembangunan infrastruktur bagi komponen pertahanan di wilayah Surabaya tidak mengganggu kegiatan operasional dari komponen pertahanan itu sendiri karena sudah diatur dan tertata dengan tertib.

DAFTAR RUJUKAN

- Abarky. (2012, April 16). Berita Tenggelamnya KRI Pulau Ratewo 702. Garuda Militer. Diakses pada 10 Januari 2024, dari <https://garudamiliter.blogspot.com/2012/04/berita-tenggelamnya-kri-pulau-ratewo.html>
- Armandos, D., Yusnaldi, & Purwanto. (2017). Implementasi kebijakan pertahanan laut dalam mendukung keamanan maritim di Pulau Nipa. *Jurnal Prodi Keamanan Maritim*, 3(2), 1-18.
- Dunne, T., Kurki, M., & Smith, S. (2018). *International Relations Theories: Discipline and Diversity*. Oxford University Press.

- Folger, J., Poole, M. S., & Stutman, R. K. (2016). *Working Through Conflict: Strategies for Relationships, Groups, and Organizations*. Routledge.
- Healey, P. (1997). *Collaborative Planning: Shaping Places in Fragmented Societies*. Macmillan.
- Mulyadi, W. (2015). *Implementasi Kebijakan Publik*. PT. Indeks.
- Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut V. (n.d.). Diakses pada 14 November 2024, dari https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Pangkalan_Utama_TNI_Angkatan_Laut_V
- Rahim, M. A. (2017). *Managing Conflict in Organizations* (4th ed.). Routledge.
- Riyadi, & Brakusuma. (2003). *Teori Perencanaan Pembangunan*. PT. Rajagrafindo Persada.
- Subagyo, T., Suhardono, E., & Suharjo, B. (2020). Implementasi kebijakan wilayah pertahanan laut di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. *Jurnal Strategi Pertahanan Laut*, 6(1), 1-15.
- Ury, W., Brett, J. M., & Goldberg, S. (1988). *Getting Disputes Resolved: Designing Systems to Cut the Costs of Conflict*. Jossey-Bass.
- Wahyuning Tyas, R. A. (2021). Implementasi teori George Edward III dalam menangani illegal, unreported dan unregulated (IUU) fishing guna mendukung tugas TNI AL. *Jurnal Prodi Manajemen Pertahanan Matra Laut*, 1-48.